

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi ruang utama pembentukan opini publik, termasuk dalam isu-isu yang menyangkut tokoh agama. Berdasarkan laporan We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 139 juta orang pada Januari 2024, setara dengan 49,9% dari total populasi.¹ Media sosial memfasilitasi pergeseran pola komunikasi dari *top-down* menuju *bottom-up*, di mana platform seperti Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok, dan YouTube memungkinkan orang mengekspresikan pendapat, berdiskusi, dan menyebarkan informasi dengan cepat sehingga pandangan terhadap suatu isu dapat berkembang menjadi opini kolektif.² Dengan jumlah pengguna yang begitu masif dan arus informasi yang bergerak cepat, persepsi publik terhadap sebuah peristiwa kerap terbentuk sebelum fakta yang sesungguhnya dapat diverifikasi secara utuh.

Fenomena terbentuknya opini publik sebelum proses verifikasi informasi selesai menunjukkan pentingnya praktik klarifikasi dalam komunikasi publik. Klarifikasi menjadi instrumen yang memungkinkan seseorang atau kelompok memberikan penjelasan atas informasi yang beredar sehingga masyarakat

¹ We Are Social, *Digital 2024: Indonesia*, dikutip dalam DataIndonesia.id, "Data Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia pada 2024," diakses 4 Juni 2026, <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-2024>.

² Hariani dan Wardana (2025), dikutip dalam "Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik," *Jurnal Komunikasi APPISI*, Vol. 1 (2026), <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Komunikasi/article/download/882/643/4941>.

memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai suatu peristiwa.³ Dalam konteks komunikasi modern, klarifikasi tidak hanya berfungsi sebagai hak individu untuk membela diri, tetapi juga sebagai upaya menjaga akurasi informasi dan mencegah berkembangnya kesimpulan yang keliru di ruang publik.

Dalam perspektif komunikasi Islam, klarifikasi memiliki keterkaitan erat dengan prinsip tabayyun dan shidiq. Tabayyun mengajarkan pentingnya memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya, sedangkan shidiq menekankan kejujuran dalam menyampaikan fakta. Kedua prinsip tersebut menjadi sangat relevan di tengah derasnya arus informasi digital yang sering kali menghadirkan potongan-potongan informasi tanpa konteks yang lengkap.⁴ Oleh karena itu, setiap bentuk klarifikasi yang dilakukan tokoh publik, termasuk tokoh agama, dapat dikaji sebagai praktik komunikasi yang mencerminkan nilai-nilai komunikasi Islam.⁵

Fenomena ini melahirkan tantangan besar bagi figur publik, khususnya para dai dan ulama. Kajian mengenai media massa menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyeleksi, menonjolkan, dan mengemas isu melalui pola *framing* sehingga memengaruhi persepsi

³ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 27–29.

⁴ Siti Nur Aeni, "Implementasi Prinsip Tabayyun dalam Menghadapi Informasi Media Sosial," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 44–58.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hujurat [49]: 6.

masyarakat dan objektivitas media itu sendiri dipengaruhi oleh kepemilikan, afiliasi politik, serta kompetensi jurnalistik.⁶ Penelitian Puji (2021) yang menganalisis pemberitaan media televisi terhadap figur tokoh agama yang dinilai kontroversial juga menemukan bahwa media cenderung membingkai tokoh agama berdasarkan kepentingan masing-masing platform, sehingga representasi yang dihasilkan kerap tidak berimbang dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat.⁷

Salah satu kasus yang secara nyata mencerminkan fenomena tersebut adalah pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ketika berita pemanggilan itu beredar, narasi yang terbangun di media dan ruang publik digital seolah menempatkan Ustadz Khalid sebagai pihak yang terlibat dalam tindak korupsi. Bahkan, ketika beliau tidak dapat memenuhi panggilan pertama karena ada halangan dan telah mengonfirmasi penjadwalan ulang secara resmi kepada pihak KPK, pemberitaan yang beredar justru menyebutnya "mangkir" sebuah framing yang kemudian ia luruskan secara langsung dalam wawancara eksklusif.⁸

⁶ "Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik terhadap Kebijakan Pemerintah," *LOKAKOTA: Jurnal Kajian Komunikasi*, diakses 4 Juni 2026, <https://jurnal.lokakota.id/index.php/jkk/article/view/6>.

⁷ Puji, "Framing Pemberitaan Media Televisi Berita terhadap Figur Tokoh Agama yang Dinilai Kontroversial," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 19, No. 3 (Desember 2021): 281–295, <https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/5335/4255/17904>.

⁸ Ustadz Khalid Basalamah, Wawancara Eksklusif bersama Kanal *Kasi Solusi*, Transkrip yang telah dirapikan, 2024, 00:00–05:25.

Untuk memahami konteks kasus ini, perlu dipahami terlebih dahulu duduk perkara korupsi kuota haji yang sedang disidik KPK. Pada tahun 2024, Indonesia mendapat kuota tambahan haji sebanyak 20.000 dari pemerintah Arab Saudi. Namun Menteri Agama periode 2020–2024 berinisial YCQ diduga membagi kuota tambahan tersebut menjadi 50% kuota haji reguler (10.000) dan 50% kuota haji khusus (10.000), padahal ketentuan mengharuskan 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Selain itu, ditemukan fakta adanya *fee* percepatan untuk haji khusus sebesar USD 2.000 atau sekitar Rp33,8 juta per jemaah.⁹ Konteks ini semakin krusial mengingat betapa berharganya kuota haji bagi jutaan umat Islam Indonesia. Masa tunggu haji reguler di Indonesia berkisar antara 11 hingga 47 tahun, sehingga jika seseorang mendaftar pada tahun 2024, estimasi keberangkatannya baru pada tahun 2035 hingga 2071.¹⁰

Adapun posisi Ustadz Khalid Basalamah dalam kasus ini, berdasarkan pernyataannya secara langsung dalam wawancara eksklusif bersama kanal *Kasi Solusi*, beliau dipanggil KPK bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi sekaligus korban. Beliau mengungkapkan bahwa dirinya bersama 122 jemaah telah membayar visa haji kuota tambahan senilai USD 4.100 per orang kepada pihak Travel Muhibah yang dikelola oleh seseorang bernama Ibnu

⁹ KPK, "KPK Tahan Tersangka Dugaan TPK Pembagian Kuota Ibadah Haji Indonesia Tahun 2023–2024," 12 Maret 2026, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tahan-tersangka-dugaan-tpk-pembagian-kuota-ibadah-haji-indonesia-tahun-2023-2024>.

¹⁰ Kumparan, "Daftar Haji 2024 Berangkat Tahun Berapa? Ini Estimasi Waktunya," diakses 4 Juni 2026, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/daftar-haji-2024-berangkat-tahun-berapa-ini-estimasi-waktunya-21vWhETyonp>.

Mas'ud melalui asosiasi AMPURI. Kronologi penipuan yang dialaminya berlapis-lapis: maktab yang dijanjikan diturunkan sepihak, sebanyak 37 jamaah diperas tambahan USD 1.000 per orang agar visanya diproses, tenda di Arafah sudah diisi pihak lain saat kedatangan, hingga uang dikembalikan secara diam-diam tanpa tanda terima setelah KPK mulai bergerak.¹¹ Seluruh bukti dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada KPK sebagai bentuk kooperasi penuh.

Ustaz Khalid Basalamah mengungkapkan sejumlah fakta baru yang semakin memperkuat posisinya sebagai pihak yang dirugikan, sekaligus membuka dimensi persoalan yang lebih luas dari sekadar kasus individual. Salah satu fakta penting yang terungkap adalah bahwa dari keseluruhan 10.000 kuota haji khusus yang dipermasalahkan, Travel Uhud milik Ustaz Khalid hanya mengambil 122 jamaah. Ini berarti masih tersisa sekitar 9.878 jamaah dari travel-travel lain yang sejauh ini tidak mendapat sorotan media sebesar yang diterima Ustaz Khalid. Beliau pun mempertanyakan secara terbuka: "Kalau 10.000 kurang 122, masih ada 9.800 sekian.

Fakta lain yang tidak kalah signifikan adalah bahwa menurut keterangan penyidik KPK kepada Ustadz Khalid, terdapat sekitar 400 travel yang rencananya akan diperiksa dalam kasus ini.¹² Angka ini mempertegas bahwa persoalan penjualan visa kuota haji tambahan adalah masalah sistemik yang melibatkan ratusan pihak bukan sekadar kesalahan satu travel atau satu tokoh

¹¹ Ustaz Khalid Basalamah, Wawancara Eksklusif, Transkrip 2024, 07:04–29:37.

¹² Ibid. Pernyataan Ustaz Khalid Basalamah mengutip keterangan penyidik KPK dalam sesi pemeriksaan kedua.

agama. Namun demikian, pemberitaan media lebih banyak mengangkat nama Ustadz Khalid Basalamah sebagai figur sentral, sehingga membangun persepsi publik yang jauh dari proporsional. Fenomena ini menjadi bukti nyata dari apa yang kemudian disebut Dahlan Iskan sebagai "kebenaran baru" sebuah kebenaran yang tidak dibangun dari fakta yang utuh, melainkan dari persepsi yang dikonstruksi oleh media melalui pemilihan angle dan intensitas pemberitaan yang tidak berimbang.

Selain isu proporsionalitas pemberitaan, wawancara ini juga mengungkap dimensi integritas komunikasi Ustadz Khalid Basalamah sebagai pengelola travel haji dan umroh. Ia memaparkan bahwa Travel Uhud memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang secara khusus melarang penggunaan kata "setaraf" dalam setiap materi promosi sebuah kebijakan yang ia terapkan sebagai bentuk komitmen anti-*tadlis* (anti-penyesatan). Ia menegaskan: "Uhud kalau buat flyer, kita usahakan tidak ada setaraf. Kenapa tidak ada setaraf? Karena kami mau komitmen. Tidak ada tadlis, nggak ada sesuatu yang samar."¹³ Dalam praktiknya, sebelum sebuah paket haji atau umroh diiklankan, pihak Uhud sudah terlebih dahulu membayar uang muka (DP) hotel yang dijanjikan, sehingga jamaah yang mendaftar dipastikan mendapatkan fasilitas sesuai yang tertera bukan fasilitas pengganti.

Terkait dengan klaim sejumlah media bahwa ada jamaah Uhud yang merasa "dibohongi" terkait perubahan status dari furoda ke haji khusus, Ustadz Khalid Basalamah juga memberikan klarifikasi yang rinci dan dapat

¹³ Ustaz Khalid Basalamah, Wawancara Eksklusif Sesi II, Transkrip TurboScribe, 2024.

diverifikasi. Ia menjelaskan bahwa seluruh jamaah berjumlah lebih dari 150 orang, dengan rincian 122 haji khusus, 6 petugas, dan sekitar 37 orang yang tetap menggunakan jalur furoda telah diinformasikan perubahan paket tersebut sejak Februari, baik melalui grup WhatsApp maupun pesan pribadi.¹⁴ Kesaksian ini dikuatkan oleh pernyataan salah seorang jamaah dari Makassar yang membuat video testimoni secara spontan dan viral di media sosial, menyatakan bahwa informasi mengenai penggunaan haji khusus sudah disampaikan sejak awal dan fasilitas yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.¹⁵ Ustadz Khalid pun mempertanyakan logika dari klaim tersebut: jika memang jamaah merasa dibohongi, mengapa tidak ada yang menyampaikan keberatan sebelum keberangkatan atau selama pelaksanaan ibadah haji, dan mengapa keluhan baru muncul setelah kasus KPK mencuat?

Fakta lain yang memperkaya analisis komunikasi dalam penelitian ini adalah sikap Ustadz Khalid Basalamah selama dan setelah proses pemeriksaan KPK. Ia mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan yang berlangsung selama 7–8 jam tersebut berjalan dalam suasana yang sangat kondusif bahkan diselingi oleh tanya jawab keagamaan antara dirinya dan para penyidik.¹⁶ Penyidik KPK pun menyampaikan apresiasi atas kooperatif Ustadz Khalid dan berharap sikapnya dapat menginspirasi masyarakat lain agar tidak takut memberikan

¹⁴ Ibid. Total jamaah: 122 haji khusus, 6 petugas, sekitar 37 orang furoda (paket bronze). Informasi perubahan paket disampaikan via grup WhatsApp dan japri sejak Februari 2024.

¹⁵ Ibid. Testimoni Pak Ariffa (jamaah dari Makassar) dan Karina Makulau (anak Raja Gowa) yang secara spontan membuat video konfirmasi bahwa perubahan paket sudah diinformasikan sejak awal.

¹⁶ Ibid. Proses pemeriksaan 7-8 jam termasuk jeda sholat, makan siang, dan tanya jawab keagamaan antara Ustaz Khalid dan penyidik KPK.

informasi. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran tim pengacara (Dr. Faisal dan tim) bukan atas inisiatifnya sendiri, melainkan atas tawaran pengacara tersebut secara sukarela dan setelah kembali dari KPK, ia tetap melanjutkan kegiatan ta'lim seperti biasa sebagai cerminan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan.

Klarifikasi yang disampaikan melalui Podcast Kasi Solusi tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena tidak hanya berisi pembelaan terhadap tuduhan yang berkembang, tetapi juga memuat penyajian kronologi, data transaksi, penjelasan hubungan antar aktor, serta argumentasi yang disampaikan secara terbuka kepada publik. Kehadiran data, angka, dan penjelasan yang rinci menunjukkan adanya upaya membangun narasi berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Hal ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji bagaimana prinsip tabayyun dan shidiq diwujudkan dalam proses komunikasi publik yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah.¹⁷

Menariknya, klarifikasi yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah dalam wawancara eksklusif tersebut tidak berhenti pada sekadar pembelaan diri. Jika dicermati secara mendalam, isi klarifikasi itu mengandung tiga dimensi analitis yang layak dikaji secara akademis. Pertama, dari sisi strategi penyampaian pesan: Ustadz Khalid membangun narasinya secara sistematis membuka dengan pernyataan posisi diri, lalu memaparkan kronologi secara

¹⁷ Ustaz Khalid Basalamah, Wawancara Eksklusif bersama Kanal Kasi Solusi, transkrip yang telah dirapikan, 2024, menit 07:04–29:37.

runtut, menyajikan data dan angka yang konkret, hingga memposisikan diri secara moral di hadapan publik. Kedua, dari sisi akurasi dan kejujuran fakta: ia menyebut angka-angka spesifik (USD 4.100 per visa, 122 jamaah, USD 37.000 tambahan), nama-nama pihak yang terlibat (Ibnu Mas'ud, Travel Muhibah, AMPURI), serta menyerahkan bukti pakta integritas dan catatan transaksi kepada KPK semua ini dapat ditelusuri dan diverifikasi. Ketiga, dari sisi nilai komunikasi Islam: sebagai seorang dai, cara Ustadz Khalid menyampaikan klarifikasi juga mencerminkan prinsip-prinsip komunikasi Islami keterbukaan, kejujuran, ketaatan kepada ulil amri, dan penghindaran dari sikap defensif yang berlebihan.

Klarifikasi yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah ini merupakan peristiwa komunikasi publik yang sarat muatan sebuah upaya membangun narasi berbasis fakta di tengah persepsi publik yang telah terlanjur terbentuk secara keliru. Di sinilah perspektif jurnalistik Dahlan Iskan menjadi relevan sebagai pisau analisis, karena salah satu pemikiran terpenting Dahlan Iskan justru berpusat pada pertarungan antara fakta dan persepsi dalam ruang publik di era digital. Dahlan Iskan secara tegas membedakan antara "kebenaran lama" yang berlandaskan fakta, dan "kebenaran baru" yang berlandaskan persepsi. Ia menyatakan: "Kebenaran lama dasarnya fakta, jadi kebenaran adalah fakta. Sekarang ini kebenaran belum tentu fakta. Sekarang kebenaran dasarnya persepsi."¹⁸ Pandangan ini sangat tepat untuk membaca kasus Ustadz Khalid

¹⁸ Dahlan Iskan, Pidato pada *Jakarta Marketing Week 2023*, Minggu 18 Juni 2023, dikutip dalam Disway.id, "Jakarta Marketing Week 2023, Dahlan Iskan Bahas Kebenaran Lama dan Baru: Antara Fakta atau Persepsi?" <https://disway.id/read/708412>.

Basalamah: publik telah terlanjur membangun "kebenaran baru" bahwa sang ustaz terlibat korupsi semata-mata berdasarkan persepsi yang dibentuk oleh pemberitaan yang terpotong bukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya.

Dahlan Iskan bahkan mencontohkan: *"Ada seseorang disebut korupsi Rp19 triliun, itu tidak masuk akal karena dia tidak memegang uang sebanyak itu. Itu tidak penting karena yang penting persepsi yang dibangun."* Ia juga menegaskan bahwa pihak yang menjadi sasaran dan mencoba menjelaskan fakta seringkali tidak berguna, karena yang menerima penjelasan itu sudah bukan manusia yang berpikir jernih, melainkan opini publik yang sudah terkondisikan oleh mesin persepsi.¹⁹ Inilah tantangan nyata yang dihadapi Ustadz Khalid Basalamah dalam klarifikasinya.

Sebagai *Lecture of the Year 2023*, Dahlan Iskan juga menilai bahwa saat ini pihak yang membangun persepsi terlihat lebih giat daripada yang membangun fakta, karena yang membangun fakta adalah manusia yang bisa merasa lelah. Ia menambahkan, wartawan profesional kini sangat sulit karena sering terkepung oleh kebenaran baru yang diciptakan oleh persepsi.²⁰

Selain soal persepsi, Dahlan Iskan juga dikenal sebagai komunikator yang cerdas memilih *angle*, cerdas memilih kata, dan cerdas melibatkan emosi pembaca, sehingga hal-hal yang berat, rumit, dan teknis menjadi mudah

¹⁹ Dahlan Iskan, dikutip dalam Kumparan, "Dahlan Iskan Bicara Persepsi yang Dibangun Buzzer di Medsos Bisa Kalahkan Fakta," 18 Juni 2023, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dahlan-iskan-bicara-persepsi-yang-dibangun-buzzer-di-medsos-bisa-kalahkan-fakta-20cyN8iEoYt>.

²⁰ Dahlan Iskan, dikutip dalam Marketeers.com, "Jadi *Lecture of the Year 2023*, Dahlan Iskan Soroti Dinamika Jurnalisme," 20 Juni 2023, <https://www.marketeers.com/jadi-lecture-of-the-year-2023-dahlan-iskan-soroti-dinamika-jurnalisme/>.

dicerna.²¹ Menurutnnya, seorang yang menyampaikan informasi kepada publik harus mampu memperoleh dan menyajikan fakta secara eksklusif, menembus narasumber yang tepat, serta menyampaikannya secara cepat namun tetap akurat.²² Standar-standar inilah kejujuran faktual, keberanian melawan persepsi yang keliru, kejelasan narasi, dan kemampuan membentuk persepsi yang tepat di benak publik yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah cara Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan klarifikasinya.

Kajian ini relevan dalam ranah Komunikasi dan Penyiaran Islam, karena seorang dai tidak hanya bertanggung jawab atas isi dakwahnya di mimbar, tetapi juga atas cara ia berkomunikasi dalam setiap aspek kehidupan publiknya termasuk ketika menghadapi krisis reputasi. Bagaimana seorang dai mengelola narasi dan berjuang melawan "kebenaran baru" yang telah terlanjur terbentuk di benak publik merupakan bagian tak terpisahkan dari citra dakwah Islam secara keseluruhan.²³

²¹ Joko Intarto, "Mengenal 'Rukun Iman Berita'," *The Dahlan Iskan Way* (Blog), 14 Maret 2013, <https://thedahlaniskanway.wordpress.com/2013/02/19/mengenal-rukun-iman-berita/>.

²² Kompas.com, "Ilmu Jurnalistik ala Dahlan Iskan," 9 Desember 2012, <https://money.kompas.com/read/2012/12/09/12023030/ilmu-jurnalistik-ala-dahlan-iskan>.

²³ Munib, "Framing Media atas Pemberitaan Sertifikasi Dai," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* (2020), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/6905>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana klarifikasi Ustadz Khalid Basalamah dalam wawancara eksklusif *Kasi Solusi* merespons "kebenaran baru" yang terbentuk di ruang publik, ditinjau dari pemikiran jurnalistik Dahlan Iskan?
2. Sejauh mana isi klarifikasi Ustadz Khalid Basalamah memenuhi prinsip kejujuran faktual dan keberanian komunikasi sebagaimana ditekankan dalam pemikiran jurnalistik Dahlan Iskan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana klarifikasi Ustadz Khalid Basalamah dalam wawancara eksklusif *Kasi Solusi* merespons dan melawan "kebenaran baru" yang terbentuk oleh framing media, ditinjau dari pemikiran jurnalistik Dahlan Iskan.
2. Mengevaluasi sejauh mana isi klarifikasi Ustadz Khalid Basalamah memenuhi prinsip kejujuran faktual dan keberanian komunikasi sebagaimana ditekankan dalam pemikiran jurnalistik Dahlan Iskan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam, khususnya dalam hal analisis komunikasi publik tokoh agama di era media digital. Selain

itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian pemikiran jurnalistik Dahlan Iskan sebagai pisau analisis dalam studi komunikasi Islam di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji fenomena *framing* media terhadap figur-figur dakwah.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi Para Dai dan Tokoh Agama** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi para dai dalam mengelola komunikasi publik, khususnya ketika menghadapi krisis reputasi akibat *framing* media yang tidak berimbang. Pemahaman tentang prinsip kejujuran faktual dan keberanian komunikasi sebagaimana ditekankan Dahlan Iskan dapat menjadi bekal dalam menyampaikan klarifikasi yang efektif, terukur, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- b. **Bagi Praktisi Media dan Jurnalis** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi praktisi media tentang dampak *framing* pemberitaan terhadap persepsi publik, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh agama. Prinsip-prinsip jurnalistik Dahlan Iskan yang menempatkan fakta di atas persepsi dapat menjadi tolok ukur praktik jurnalisme yang bertanggung jawab.
- c. **Bagi Masyarakat** Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi media masyarakat, khususnya dalam memilah antara fakta dan persepsi yang kerap bercampur di ruang publik digital, sehingga

masyarakat tidak mudah terjebak dalam "kebenaran baru" yang dibangun bukan berdasarkan fakta.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan pijakan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pemikiran jurnalistik tokoh-tokoh pers Indonesia sebagai kerangka analisis dalam studi komunikasi Islam.